

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Wibowo, Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Danintegritas. Bandung: Penerbit Cv. Media Sains Indonesia, 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2022.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Penerbit Pt. Citra Adityabakti, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Rusianto Agus, “Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas Teori Dan Penerapannya”. Jakarta: Kencana, 2023.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986.

Iman Jalaludin Rifa’I et al. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi II. Banten: PT.Sada Kurnia Pustaka. 2023.

Rizkan Zulyadi, Andi Hakim. Penemuan Hukum Harmonisasi *The Living Law* Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Edisi I Medan: Pustaka Prima, 2023.

Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. 2002.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Agus Surono. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit. Edisi Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar, 2016.

Agus Budianto. *Delik Suap Korporasi di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2012:5.

Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010: 77-78.

Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004: 140.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, LN. 2009/No. 155, TLN No. 5074

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, LN.2007/NO.33, TLN NO.4700,

Undanng-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonnesia, LN. 2002/No.2, TLN NO. 4168.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN.2001/No. 134, TLN No. 4150.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN. 1981/No. 76, TLN. No. 3209.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

C. Skripsi, Jurnal dan Artikel Ilmiah Lainnya

Dwi Putra Fachri Hamza. “Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terkait Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Negara”. *Maleo Law Jurnal*, Vol.8, 2024: 82.

Fitri Khodijah Nasution. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Studi Kasus: No.54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn”. *Jurnal Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol.7. No.2. 2024:8.

- M. Adhiyatatama Perdana Abusalin. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Proyek Pekerjaan Umum Dan Perumahan Di Kabupaten Muara Enim. Skripsi, Fakultas Hukum Sriwijaya, 2021.
- Muhammad Fachriansyah Hamiruddin, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Pailit (Studi Kasus No.1824K/Pid.Sus//2012), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020: 8.
- Yohanes Pande, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap dalam Bidang Politik." *Law Reform* · Vol 6, 2011: 102.
- M.Wisnu Imam Saputra, Skripsi, Perspektif Kriminologi Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang, 2019:4.
- Ridlwani Zulkarnain. Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5, 2012.
- Eki Sirojul Baehaqi, Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.1, 2022: 4.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama 2014: 97.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. 2002: 155.
- Medika Andarika Adati, et al. Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, Vol. 6, 2018:11
- Mahmud Mulyadi, Rocky Marbun. Penyuapan Terhadap Pejabat Negara Diluar Kewenangannya: Kasus Bupati Labuhan Batu Utara. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol.2, 2023: 11.
- Rosidi Ahmad. Et al. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Sosioloogis (*Field Reesarch*). *Journal Law Government*, Vol.2 No.1, 2024: 47.
- I Gede Angga Adi Utama. Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Vol. 3, 2020: 212.

I Gusti Ketut Ariawan. Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*. Vol. 1, 2013:29.

Mohammad Noffaizi Golonggom, et al. *Penegakkan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional*". *Lex Crimen*, Vol.10, 2021: 125.

Nur Atika, Suap (*Risywah*) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022: 36.

Reyna Yuliza Mahmudah, Intan Prihatini. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Serta Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1117/pid.sus/2019/pn. Jkt.pst). *Jurnal Hukum Pidana*, vol,1, 2025: 37.

Diana Novianti. Analisa Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Terhadap Hasil Audit Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Justici*. Vol. 12. 2019: 14.

Putra Akbar Saleh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan". *Lex et Societatis*, Vol.1, 2013: 79.

Prisco Jeheskiel Umboh, "Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana". *Lex Crimen*, Vol. 2, 2013: 116.

Azwar Agus, "Pembuktian Tindak Pidana Suap dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol.7, 2021: 101.

Faisal Santiago. Strategi pemberantasan kejahatan korupsi: kajian legal sosiologis. *Lex Publica*. Vol 1 2014: 55-69.

Brian Lemuel Rachman. Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia. *Lex Et Societatis*. Vol. 6, 2018: 73.

Muhammad Afif. Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*. Vol.1, 2018: 101.

Ivana Riskika Ramadhanti, Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah Di Bangka Belitung Oleh Kejaksaan Agung, *Jurnal Bevinding*. Vol 2, 2024: 35-36.

- Priyo Hutomo, Markus Marselinus Soge. Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*. Vol.1. 2016: 53.
- Ika Puji Lestari, Studi Penanganan Korupsi Mengenai Pengadaan Tanah Untuk Bandara Namniwel Dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:06/Pid.B/2011, *Jurnal Verstek* Vol.1, 2013: 57.dari <http://www.damang.web.id>, diakses 15 Juli 2025.
- Putu Sumawan, Deli Bunga Saravistha. Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap *Ratio Decidendi* Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Analisis Hukum*. Vol.6, 2023: 63.
- Enrico Simanjutak. Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16. 2019. 84.
- Ahmad Sofyan. Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum." *Online*) <https://www.researchgate.net/publication/303805700>, diakses 4 2016. 1.
- M. Fadhel Izta Ghani dan Galih Saputra. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia." *Jurnal Terekam Jejak*. Vol. 3. 2025.27.
- Sudirman, et.al. "Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, Vol. 3, 2020. 41.
- Muhammad Chaerul Risal, "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5, 2018. 84.
- M. Agus Santoso. Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Ketatanegaran Di Indonesia. *Yustisia*. Vol. 1. 2012.18.
- Artidjo Alkostar. Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*. Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia. Vol.1. 2013.127.
- Muslihain Rais. Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol.6. 2017.
- Edi Rosiadi. Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal*. Vol. 1. 2016. 383.

Artidjo Alkostar, Alkostar, Artidjo. "Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA." *Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan oleh Center for Local Law Development Studies UII di Auditorium UII Lt.* Vol. 3. 2009.

Artidjo Alkostar. "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime." *Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia.* Vol. 1. 2013. 16.

Missleini dan Evi Retno Wulan. "The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23." *Jurnal Hukum Sehasen.* Vol.10. 2024. 188.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Suap, 2024 Diakses dari <https://kemdikbud.go.id> <https://pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/9556-suap-hadiah-dan-hakim>

Mahkamah Agung, 2024 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn, Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef295f5c233036abb31353313431.html>

Pengadilan Negeri Medan, putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Mdn, diakses dari http://sipp.pn/Medan.kota.go.id/index.php/detail_perkara

<https://pa-semarang.go.id/idpublikasi-pengadilan/arsip-artikel/9556-suap-hadiah-dan-hakim>

Yoga Sukmana, "Korupsi di Sektor Swasta Lebih "Gila"" <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/07304001/korupsi-di-sektor-swasta-lebih-gila>.

Syaiful. Penafsiran Hukum: Konsep, Metode, dan Pentingnya dalam Proses